

# **REVISI KE - 1 RENCANA STRATEGI 2017-2022**



**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Jendral Sudirman 79, Komplek Perkantoran Marabahan (70513) ☎ (0511) 4799940  
**KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN BARITO KUALA**

**Nomor : 460/ 047 /DISSOS/2021**

**TENTANG**

**REVIU KESATU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017-2022**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPALA DINAS SOSIAL**

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi . dokumen Renstra oleh Inspektorat, maka Renstra Dinas Sosial 2017-2022 perlu direviu.
- 2 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana . dimaksud dalam huruf a diatas maka reviu (perbaikan) dokumen Renstra tahun 2017-2022 ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial .
- Mengingat : 1 Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem . perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4421);
- 2 Undangi-undang nomor 17 tahun 2007 tentang . pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 - 2025 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4700);
- 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 . tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengganti Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara . dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

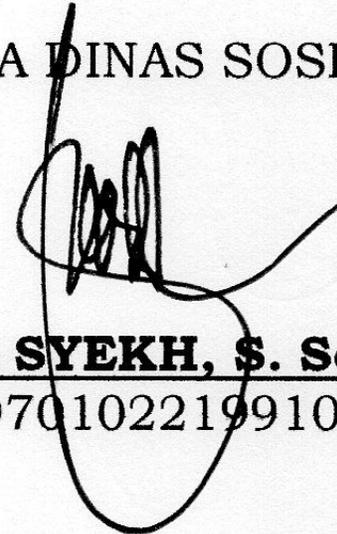
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
8. Peraturan daerah kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan satuan polisi pamong praja kabupaten Barito Kuala;
9. Peraturan daerah kabupaten Barito Kuala nomor 2 tahun 2018 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022;
10. Peraturan bupati Barito Kuala Nomor 103 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Barito Kuala tahun 2021;
11. Dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Melakukan reviu kesatu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial tahun 2017 – 2022.
- Kedua : Reviu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi dokumen Renstra oleh inspektorat.
- Ketiga : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Marabahan, 14 September 2021

KEPALA DINAS SOSIAL,



**H. FUAD SYEKH, S. Sos, M. AP**

NIP. 197010221991011001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya Revisi Ke - 1 **Rencana Strategi (RENSTRA)** Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 ini dapat diselesaikan.

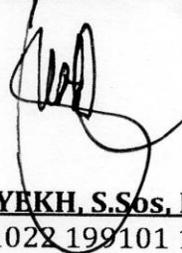
Penyusunan Revisi Ke - 1 Rencana Strategi (RENSTRA) ini memberikan gambaran tentang Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Dinas Sosial Barito Kuala selama 5 (lima) tahun mendatang yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi Dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Kuala.

Penyusunan Revisi Ke - 1 Rencana Strategi (RENSTRA) ini melalui upaya maksimal kami, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, untuk itu saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan Revisi Ke - 1 Rencana Strategi (RENSTRA) ini.

Marabahan, 14 September 2021

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Barito Kuala,



**H. FUAD SYEKH, S.Sos. M.AP**  
NIP. 19701022 199101 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN .....	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosi.....	6
2.1.1 Tugas .....	6
2.1.2 Fungsi .....	6
2.1.3 Struktur Organisasi .....	7
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial .....	8
2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan...8	
2.2.2 Jumlah Pegawai yang Telat Mengikuti Pelatihan Penjenjangan .....	9
2.2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	9
2.2.4 Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi .....	10
2.2.5. Fasilitas Pelengkapan .....	10
2.3 Kinerja Pelayanan .....	10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	16
2.4.1 Tantangan .....	16
2.4.2 Peluang .....	17

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL ....	18
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial .....	18
	3.1.1 Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis .....	18
	3.1.2 Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal...	20
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Terpilih..	21
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga.....	21
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	23
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	23
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN .....	25
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	26
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	28
BAB VII	KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	33
BAB VIII	PENUTUP .....	35

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	8
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan .....	9
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....	9
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselonisasi .....	10
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala .....	11
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2017-2022 .....	25
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	27
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial .....	29
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	33

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan SOTK Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.....	7
--	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pencapaian tujuan suatu organisasi yang dikelola secara modern hanya dapat dicapai jika menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara baik. Salah satu fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan. Perencanaan menurut dimensi waktu dapat dikelompokkan ke dalam perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah perlu disusun untuk dipedomani dalam menyusun perencanaan jangka pendek.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Rencana pembangunan daerah berupa Dokumen Rencana Strategis (Renstra) disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala menyusun serangkaian program dan kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen dinas dalam rangka pencapaian tujuan, yang tentunya merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 didasari dari Visi dan Misi Bupati Barito Kuala dalam **Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022**.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 adalah:

1. Landasan Idiil: Pancasila;
2. Landasan Konstitusional: UUD 1945;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022; dan

18. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.

19. Perda no 6 thn 2012 ttg RTRWK Batola tahun 2012-2031

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman serta mendayagunakan seluruh potensi yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam menjawab tuntutan perkembangan permasalahan dan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu 2017-2022;
2. Mempermudah pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala baik secara internal maupun eksternal; dan
3. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2017 adalah:

- 1) Agar dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, menganalisa/mengkaji secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan berorientasi ke masa depan.
- 2) Agar dapat memberikan layanan prima dalam usaha kesejahteraan sosial dengan melibatkan seluruh pelaku (*stakeholder*) penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial
- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**

- a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial
- b. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- c. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)
- d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- e. Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial**

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala sebagai instansi Pemerintah dalam lingkup Kabupaten Barito Kuala bertugas melaksanakan urusan di Bidang Sosial dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.

##### **2.1.1 Tugas**

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

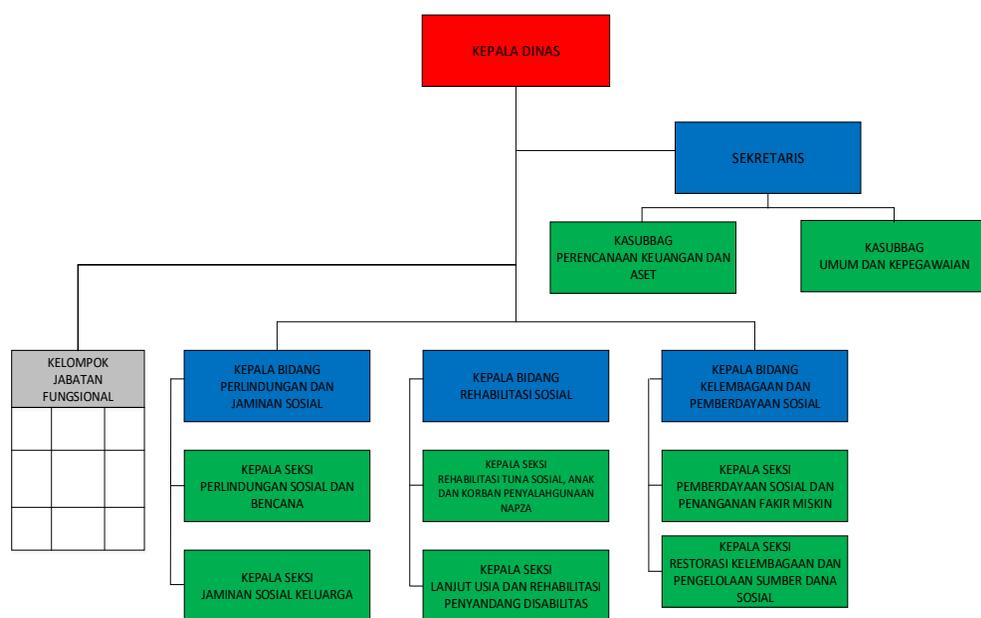
##### **2.1.2 Fungsi**

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala melaksanakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.

4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

### 2.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Bagan SOTK Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

#### 2.1.3.1 Unsur Pelaksana

1. Sekretariat, terdiri dari (a) Sub Bagian Umum Kepegawaian, (b) sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari (a) Seksi Perlindungan Sosial dan Bencana, (b) Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

3. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari (a) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak dan Korban Penyalahgunaan Napza, (b) Seksi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas.
4. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial terdiri dari, (a) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, (b) Seksi Restorasi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial.

### 2.1.3.2 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan Fungsional hingga saat ini belum terisi meskipun secara struktur organisasi posisi ini tersedia.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

### 2.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Secara Keseluruhan jumlah pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala berjumlah 19 orang, yang terdiri dari 8 orang pria dan 11 orang wanita yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan formal sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Strata 3	- orang Pria - orang Wanita	0,00% 0,00%
2	Strata 2	1 orang Pria 3 orang Wanita	5,00% 15,79%
3	Strata 1	5 orang Pria 5 orang Wanita	21,00% 16,00%
4	Strata D. III	- orang Pria - orang Wanita	0,00% 0,00%
5	SLTA	2 orang Pria 3 orang Wanita	10,53% 21,00%
Jumlah		8 orang Pria 11 orang Wanita	42,00% 57,89%

### 2.2.2 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjurusan

Keadaan pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala yang telah mengikuti pelatihan penjurusan sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjurusan**

No	Jenis Pelatihan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Diklat Pim II	1	Orang Pria
		-	Orang Wanita
2	Diklat Pim III	2	Orang Pria
		1	Orang Wanita
3	Diklat Pim IV	2	Orang Pria
		5	Orang Wanita
	Jumlah	5	Orang Pria
		6	Orang wanita

### 2.2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Secara umum sebagian besar pegawai di dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala adalah Golongan IV (empat) berjumlah 5 orang (21,00%), Golongan III (tiga) berjumlah 11 orang (58,00%) dan Golongan II (dua) berjumlah 4 orang (21,00%). Secara rinci keadaan pegawai berdasarkan golongan sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang Pria - orang wanita
2	Pembina Muda Tk. I (IV/b)	1 orang Pria - orang wanita
3	Pembina (IV/a)	1 orang Pria 2 orang wanita
4	Penata Tk I (III/d)	2 orang Pria 4 orang wanita
5	Penata (III/c)	1 orang Pria 1 orang wanita
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	0 orang Pria 0 orang wanita
7	Penata Muda (III/a)	- orang Pria - orang wanita
8	Pengatur Tk. I (II/d)	0 orang Pria 1 orang wanita
9	Pengatur (II/c)	- orang Pria 2 orang wanita
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	- orang Pria 0 orang wanita
Jumlah		8 orang Pria 11 orang wanita

## 2.2.4 Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi

Menduduki jabatan struktural dan fungsional (non angka kredit) di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Eselonisasi**

No	Jabatan Eselon	Jumlah (orang)	Persentase
1	Eselon II. B	1 Orang Pria - Orang wanita	5,26% -
2	Eselon III. a	1 Orang Pria - Orang wanita	- -
3	Eselon III. b	1 Orang Pria 1 Orang wanita	5,26% 5,26%
4	Eselon IV. A	3 Orang Pria 5 Orang wanita	15,78% 26,31%
5	Non Struktural/ Fungsional Non angka Kredit	2 Orang Pria 5 Orang wanita	10,52% 26,31%
Jumlah ASN		8 Orang Pria 11 Orang wanita	42,11% 57,89%

## 2.2.5 Fasilitas Perlengkapan

Fasilitas atau perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Sosial berupa:

1. Peralatan kantor dan mesin memadai
2. Gedung dan bangunan semi permanen
3. Jaringan telpon, listrik dan air yang memadai
4. Aset tetap lainnya.

### a. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala meliputi pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2017 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2017

Sebelum Review

NO.	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian				
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan usaha KUBE	-	-	70	70	70	70	70	70	70	80	100	100
2	Jumlah Keluarga Rawan Sosial Ekonomi yang Menerima Bantuan/Stimulan Usaha	-	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3	Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan kerja berbasis panti	-	-	40	40	40	40	40	40	40	37	39	40
4	Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan berternak	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
5	Jumlah Lanjut Usia Potensial yang Mendapat Bantuan Stimulan Usaha	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	25
6	Jumlah lanjut usia yang menerima jaminan/perlindungan sosial	-	-	-	-	-	132	132	-	-	-	132	132

7	Jumlah lanjut usia yang menerima bantuan bedah rumah	-	-	2	2	2	2	2	2	3	1	1	1
8	Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan kerja berbasis panti	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
9	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan stimulan usaha	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5
10	Jumlah penyandang disabilitas berat yang menerima bantuan jaminan/perlindungan sosial	-	-	-	-	23	23	23	-	-	23	23	23
11	Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang Menerima Bantuan jaminan/perlindungan sosial	-	-	-	-	-	1.306	1.306	-	-	-	1.306	1.306
12	Jumlah orang terlantar, eks narapidana dan penyandang penyakit sosial lainnya yang dipulangkan	-	-	50	50	50	50	50	13	20	13	11	17
13	Jumlah Paket Bantuan yang Di Berikan Kepada Korban Bencana Alam dan atau Bencana Sosial	-	-	200	200	200	200	200	149	103	173	96	152
14	Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang Memperoleh Sertifikasi	-	-	8	8	8	8	9	8	8	8	8	9
15	Jumlah Desa dengan Karang Taruna Aktif	-	-	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143
16	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dibina	-	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

17	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang Di Bina	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	55
18	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) yang dibina			17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

#### Kabupaten Barito Kuala

Sesudah Review

NO	Indikator	SPM / standar nasional	Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan usaha KUBE			270	360	125	-	270	360	125	-	
2	Jumlah Keluarga Rawan Sosial Ekonomi yang Menerima Bantuan Stimulan Usaha			60	80	120	160	60	80	120	160	

3	Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan kerja			120	180	220	260	120	180	220	260	
4	Jumlah anak yang mendapat pelayanan sosial terhadap kekerasan seksual, fisik, emosional dan ekonomi pada anak			120	180	120	180	120	180	120	180	
5	Jumlah lansia potensial yang menerima bantuan stimulan usaha			2	4	6	8	2	4	6	8	
6	Jumlah terkirimnya penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan kerja berbasis panti			4	8	12	16	4	8	12	16	
7	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan stimulan usaha			6	9	12	15	6	9	12	15	
8	Jumlah Lanjut Usia Potensial yang Mendapat Bantuan Stimulan Usaha			75	150	185	220	75	150	185	220	
9	Jumlah Anak Terlantar yang Mendapat Pelatihan			120	180	240	300	120	180	240	300	
10	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan jaminan/perlindungan sosial			2612	3918	-	-	2612	3918	-	-	

11	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat			750	1000	1200	1400	750	1000	1200	1400	
12	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pemutkhiran Data			17	17	17	17	17	17	17	17	
13	Jumlah Orang Tua yang Meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan Preventif dan Sikap Mengenai Kekerasan Seksual, Fisik, emosional dan Ekonomi			120	180	240	300	120	180	240	300	
14	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS dan Karang Taruna) yang dibina			-	58	58	73	-	58	58	73	
15	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina			-	17	17	21	-	17	17	21	
16	Jumlah TAGANA yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya			82	123	164	205	82	141	164	205	

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

Keberhasilan upaya pembangunan kesejahteraan sosial dan pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan *stakeholder* yang ada, sehingga dapat diwujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang cukup komprehensif.

### 2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pemberian pelayanan kesejahteraan sosial yang holistik, komprehensif dan berkelanjutan adalah:

1. Tren Permasalahan Sosial yang terus berkembang sebagai akibat dari adanya krisis, konflik sosial, bencana alam dan gejala disintegrasi sosial.
2. Belum validnya *database* PMKS Kabupaten Barito Kuala
3. Belum adanya SPM Bidang Sosial
4. Belum optimalnya kerja sama antar bidang pada Dinas
5. Belum optimalnya pengintegrasian program dan kegiatan Dinas dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
6. Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan, khususnya dalam penanganan PMKS yang dikembangkan selama ini umumnya tidak berjalan efektif atau tidak maksimal, karena cenderung hanya menyentuh masalah di hilir, sementara akar masalah di tingkat hulu tidak banyak ditangani. Pendekatan penyantunan terhadap PMKS

memang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tetapi dengan dukungan dana yang terbatas, tentu sulit bagi Dinas Sosial dan dinas terkait lain di Kabupaten Barito Kuala untuk dapat mengatasi akar masalah yang sebenarnya.

7. Ancaman bencana alam banjir dan bencana sosial merupakan bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
8. Masih rendahnya komitmen sebagian penerima manfaat program untuk mendukung tercapainya tujuan dari program/kegiatan yang diberikan.
9. Kurang optimalnya penanganan, perawatan dan kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PMKS itu sendiri.

#### **2.4.2 Peluang**

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan adalah:

1. Tersedianya sumber daya manusia (SDM)/ASN pada Dinas.
2. Adanya sarana dan prasarana kerja yang memadai
3. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Dinas Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial
4. Kearifan lokal yang ada ditengah kehidupan masyarakat
5. Keberadaan dunia usaha melalui program CSR yang mereka miliki
6. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang dapat mendukung peran dan mempermudah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial**

Dinas sosial Kabupaten Barito Kuala yang melaksanakan urusan Bidang Sosial memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan Program/Kegiatan urusan sosial.

##### **3.1.1 Identifikasi dan Analisa Lingkungan Strategis**

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Pemahaman terhadap perubahan lingkungan strategis akan mendorong pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 secara efektif dan efisien dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

##### **3.1.1.1 Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal**

Analisis lingkungan internal Dinas Sosial KABUPATEN Barito Kuala dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Analisa lingkungan internal pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala meliputi identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, yaitu:

1. Kekuatan, yang dimiliki:
  - a. Tersedianya sumber daya manusia (SDM)/ASN yang ada.
  - b. Adanya sarana dan prasarana kerja yang memadai.
  - c. Berkembangnya kemampuan ASN dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial dari waktu ke waktu.

2. Kelemahan, yang dimiliki:

- a. Ketersediaan *database* PPKS yang terus mengalami perbaikan/verifikasi.
- b. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai sebagai pelaku pembangunan kesejahteraan sosial.
- c. Belum optimalnya kerjasama antar bidang pada Dinas
- d. Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan, khususnya dalam penanganan PPKS yang dikembangkan selama ini umumnya tidak berjalan efektif atau tidak maksimal, karena cenderung hanya menyentuh masalah di hilir, sementara akar masalah di tingkat hulu tidak banyak ditangani. Pendekatan penyantunan terhadap PPKS memang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tetapi dengan dukungan dana yang terbatas, tentu sulit bagi Dinas Sosial dan dinas terkait lain di Kabupaten Barito Kuala untuk dapat mengatasi akar masalah yang sebenarnya.
- e. Adanya Pandemi Covid 19 sejak April 2020 mengakibatkan banyak kegiatan yang tidak terlaksana.
- f. Adanya refocusing anggaran menyebabkan program/ kegiatan yang sudah dianggarkan sebelumnya terpotong dengan adanya refocusing.

**3.1.1.2 Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal**

Identifikasi dan analisa lingkungan eksternal Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dilakukan untuk mencatat dan mengkaji peluang yang tersedia dan ancaman yang mungkin muncul dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas dalam 5 (lima) tahun mendatang (2017-2022). Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa lingkungan eksternal, peluang dan ancaman yang harus dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam menjalankan tupoksi adalah sebagai berikut:

1. Peluang, yang ada:
  - a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Dinas Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial
  - b. Kearifan lokal yang ada ditengah kehidupan masyarakat
  - c. Keberadaan dunia usaha melalui Program CSR yang mereka miliki
  - d. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung peran Dinas Sosial.
2. Ancaman, yang ada:
  - a. Tren permasalahan sosial yang terus berkembang sebagai akibat dari adanya krisis, konflik sosial, bencana alam dan gejala disintegrasi sosial
  - b. Masih rendahnya komitmen sebagian penerima manfaat program untuk mendukung tercapainya tujuan dari program/kegiatan yang diberikan.
  - c. Komitmen politik dan dukungan anggaran (APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi) rendah.
  - d. Ancaman bencana alam banjir dan bencana sosial merupakan bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
  - e. Kurang optimalnya penanganan, perawatan dan kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PPKS itu sendiri.
  - f. Adanya refocusing anggaran untuk pembiayaan penanganan Covid 19 dn banjir di Barito Kuala.

### **3.1.2 Keseimbangan Lingkungan Internal dan Eksternal**

Berdasarkan hasil identifikasi lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan dengan identifikasi lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman, menunjukkan keseimbangan yang positif. Kondisi ini menyiratkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala masih harus meningkatkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan bidang sosial

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2017-2022.

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2017-2022 adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota”** yang dijabarkan sebagai berikut:

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, ditempuh melalui 4 (empat) Misi, yaitu :

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota;
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian;
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia; dan
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, untuk pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 maka Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala melaksanakan misi ke-3, yaitu : **“Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesional Sumber Daya Manusia”**.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial RI Dan Renstra Dinas Sosial Provinsi**

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Visi Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2015-2019 adalah: **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”**.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mencapai Visi tersebut diatas, ditempuh dengan melaksanakan 7 (tujuh) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi, dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan penduduk maju, berkeadilan, dan demokratis berdasarkan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif, dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang Tinggi, Maju, dan Sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan strategi pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Dinas Sosial kabupaten Barito Kuala sesuai Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2017-2022 adalah : **“Meningkatkan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”**, dengan sasaran strategi. **“Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”**. Sasaran ini selaras dengan Visi dan Misi Bupati Barito Kuala yaitu **“Terwujudnya Barito Kuala Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)”**, pada Misi ke-3 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan profesionalitas Sumber Daya Manusia”** dan sasaran ke-2 yaitu **“Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat”**.

Sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Barit Kuala ini juga mendukung terwujudnya Visi Kementrian Sosial Republik Indonesia yaitu: **“Mewujudkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang Tinggi, Maju, dan Sejahtera”**.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala sebagai perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah dalam pembangunan Bidang Sosial tidak membahas mengenai tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategi adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, telaahan tujuan dan sasaran Kementerian Sosial, dapat disimpulkan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala adalah : “Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yang di iringi dengan :

1. Ketersediaan *database* PMKS yang masih terus diverifikasi.
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai sebagai pelaku pembangunan kesejahteraan sosial.
3. Pembangunan kesejahteraan sosial khususnya dalam penanganan PMKS memang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tetapi dengan dukungan dana yang terbatas, tentu sulit bagi Dinas Sosial dan Dinas terkait lain di Kabupaten Barito Kuala untuk dapat mengatasi akar masalah yang sebenarnya.
4. Sinergitas dan sinkronisasi program/anggaran yang kurang konsistensi, efektif, berkelanjutan dan terfokus serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya.
5. Komitmen politik dan dukungan anggaran (APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi) rendah.

6. Ancaman bencana alam banjir dan bencana sosial merupakan bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
7. Kurang optimalnya penanganan, perawatan dan kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PMKS itu sendiri.
8. Adanya refocusing anggaran karena pandemi Covid 19 dan penanggulangan bencana banjir.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS SOSIAL**

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembangunan sosial selama Tahun 2017-2022 sesuai visi dan misi yang ada pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Memperhatikan visi, misi tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam 5 (lima) tahun mendatang, yaitu :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala 2017-2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Target Kinerja %				
					2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kesejahteraan dan daya saing masyarakat	Persentase Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	Jumlah PPKS yang Mandiri dibagi Jumlah PPKS yang terdata dikalikan 100%.	1,25 %	1,25 %	1,25 %	1,50 %	10 %

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan SKPD, yang perlu diperhatikan adalah tor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan organisasi secara menyeluruh. Pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal Dinas dengan keanekaragamannya.

Analisa lingkungan internal tentang kekuatan dan kelemahan. Juga analisa lingkungan eksternal tentang peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam 5 (lima) tahun mendatang, telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yang dimaksudkan untuk menentukan strategi dan kebijakan yang harus ditempuh oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2017-2022.

Strategi merupakan suatu respon terhadap tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan, program/kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Strategi juga diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala. Strategi yang disusun, juga harus mengacu dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan. Dalam mengemban tugas dan wewenangnya, Dinas Sosial harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap pada jalur yang telah ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik untuk aparatur maupun masyarakat yang dilayani.

Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota					
MISI : Meningkatkan Kemampuan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat	Persentase Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	Peningkatan Kualitas Wira usaha, Bantuan, perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pelatihan dan Pendampingan Wira Usaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
					Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan sosial yang tepat guna dan tepat sasaran

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dibuat, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala guna mewujudkan visi Pemerintahan Kabupaten melalui pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala setiap tahunnya.

TABEL 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan tahun						Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Target/Pagu	Target/Pagu	Target/Pagu	Target/Pagu	Target/Pagu	Target/Pagu		
<i>Menurunnya Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Kab. Batola</i>				<i>Persentase Tingkat Kemiskinan</i>					4,32%	4,25%			
	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	100%	1,25%	1,25%	1,25%	1,50 %	1,50%		Kepala Dinas	
			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<i>Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>	100%	100% 232,167,741	100%	100%	10 %	25,2%		<i>Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial</i>	
			Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan jaminan/perlindungan sosial	1.306 KPM	0	0	0	10.140 jiwa	8.064 jiwa		Kasi Jaminan Sosial Keluarga	
				Jumlah keluarga rawan sosial ekonomi yang menerima bantuan simulan usaha	0	0	0	0	40 KK	40 KK			
			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<i>Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat.</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<i>Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial</i>	
			Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat	673 KK	0	0	0	20.422 Paket	20.340 Paket		Kasi Perlindungan Sosial dan Bencana	

				Jumlah TAGANA yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya	41	0	0	0	33 orang	33 orang		
				Jumlah TAGANA yang dibina					33 orang	33 orang		
			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Valid.</b>	<b>100%</b> <b>107,204,378</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>
			Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pemutakhiran Data	0	0	0	17 Kec	17 Kec	17 Kec		Kasi Jaminan Sosial Keluarga
			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b> <b>240,502,294</b>	<b>100%</b> <b>252,527,409</b>	<b>100%</b> <b>277,780,150</b>	<b>100%</b> <b>305,558,165</b>	<b>100%</b> <b>33,113,982</b>		<b>Kabid Rehabilitasi Sosial</b>
			Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah anak terlantar yang mengikuti pelatihan kerja	196	0	0	0	40 orang	40 orang		Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak dan Korban Penyalahgunaan Nafza
				Jumlah orang tua yang mendapat pelayanan social terhadap kekerasan seksual, fisik, emosional dan ekonomi pada anak	0	0	0	0	30 orang	30 orang		Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak dan Korban Penyalahgunaan Nafza
				Jumlah anak yang mendapat pelayanan social terhadap kekerasan seksual, fisik, emosional dan ekonomi pada anak	0	0	0	0	66 orang	66 orang		
			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b> <b>253,207,783</b>	<b>100%</b> <b>265,868,172</b>	<b>100%</b> <b>278,528,561</b>	<b>40%</b> <b>291,188,950</b>	<b>50%</b> <b>303,849,340</b>		<b>Kabid Rehabilitasi Sosial</b>
			Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah lansia potensial yang menerima bantuan stimulan usaha	225 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	150 orang	150 orang		

				Jumlah lansia yang menerima bantuan bedah rumah	8 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	1 orang	1 orang		
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah veteran dan janda veteran yang menerima bantuan sosial	0 Orang	0 orang	0 orang	0 orang	123 orang	123 orang		
			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<i>Persentase penyandang disabilitas yang mandiri</i>	<b>100%</b>	<b>0 orang</b>	<b>0 orang</b>	<b>0 orang</b>	<b>40%</b>	<b>50%</b>		<b>Kabid Rehabilitasi Sosial</b>
				Jumlah terkirimnya penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan kerja berbasis panti		<b>0 orang</b>	<b>0 orang</b>	<b>0 orang</b>	2 Orang	2 Orang		Kasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas
				Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan stimulan usaha		<b>0 orang</b>	<b>0 orang</b>	<b>0 orang</b>	2 Orang	2 Orang		
				Jumlah Penyandang disabilitas yang mendapat bantuan alat bantu.		<b>0 orang</b>	<b>0 orang</b>	<b>0 orang</b>	4 Orang	5 Orang		
			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<i>Persentase penyandang penyakit sosial (eks narapidana, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mandiri.</i>	<b>100%</b>	<b>100% 32,768,260</b>	<b>100% 34,406,673</b>	<b>100% 37,847,340</b>	<b>100 % 41,632,074</b>	<b>100% 45,795,281</b>		<b>Kabid Rehabilitasi Sosial</b>
			Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang terlantar, eks narapidana dan penyandang penyakit sosial lainnya yang dipulangkan	71 orang	0 Orang	0 orang	90 orang	90 orang			Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak dan Korban Penyalahgunaan Nafza
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<i>Persentase keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha</i>	<b>100%</b>	<b>1,09% 254,124,739</b>	<b>1,09% 266,830,976</b>	<b>1,09% 279,537,213</b>	<b>15% 279,537,213</b>	<b>15% 304,945,687</b>		<b>Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial</b>

			Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Pelatihan yang dilaksanakan		125 Orang	125 Orang	125 orang	16 Klp	4 Klp		Kasi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
				Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan usaha KUBE		0 orang	0 orang	0 orang	11 Klp	9 Klp		
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase keluarga Miskin berumah tidak layak huni yang menerima bantuan.		0 orang	0 orang	0 orang	10,1%	10,1%		
				Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan peralatan rumah tangga		0 orang	0 orang	0 orang	11 KK	11 KK		
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<i>Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif</i>	100%	100% 228,120,085	100% 239,526,089	100% 263,478,697	100% 289,826,567	100%		<b>Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial</b>
			Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS dan Karang Taruna) yang dibina		0 orang	0 orang	0 orang	23 buah	23 buah	23 buah	Kasi Restorasi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial
				Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina		0 orang	0 orang	0 orang	72 orang	72 orang	72 orang	
			<b>ROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase pengembangan kesetiakawanan sosial dan pelestarian nilai kepahlawanan yang dikelola	0	0 51,712,750	0 54,298,388	0 59,728,226	100% 65,701,049	100% 72.271.154	100%	<b>Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial</b>
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Jumlah hari keperintisan/kepahlawanan yang diperingati	0	0	0	0	4 keg.	3 Keg.	3 Keg	Kasi Restorasi Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 melalui Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala. Mengingat eratnya kaitan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dengan pencapaian Visi dan Misi yang ada, maka harus disusun untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala seperti tercantum dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam pencapaian Misi, Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala harus mampu berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 3, yaitu : Meningkatkan kualitas ketaqwaan, kecerdasan Kesehatan, dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia.

Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase keluarga miskin yang berhasil mengembangka usaha	8.281	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	7.831
2	Persentase lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	2368	100%	100%	100%	100%	2.238
3	Persentase penyandang Disabilitas yang Mandiri	2759	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	2.734
4	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	100%	100%	100%	100%	0
5	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	10540	100%	100%	100%	100%	1.306
6	Persentase Kecamatan Yang Memiliki Basis Data Terpadu yang Validasi	105.590	20%	20%	20%	20%	100%

7	Persentase peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan preventif terhadap penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya	0	100%	100%	100%	100%	150
8	Persentase peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan preventif terhadap kekerasan pada anak	0	100%	100%	100%	100%	0
9	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Bantuan Tanggap Darurat	0	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif	261	100%	100%	100%	100%	261

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala periode 2017-2022 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kuala untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan penjabaran Renstra Periode 2017-2022 sangat ditentukan oleh kesiapan dinas, ketatalaksanaan, SDM, anggaran dan komitmen seluruh jajaran ASN yang ada. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017-2022, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, jika diperlukan, dapat dilakukan perubahab/revisi muatan Renstra, termasuk indikator kinerja yang ada dalamnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Periode 2017-2022.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Periode 2017-2022 dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito kuala pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala 2005- 2025.

Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 akan menjadi tolak ukur keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala yang akan disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) da Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Barito Kuala pada setiap tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.